

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis lahir di Brebes pada tanggal 4 Agustus 1977 Putra keenam dari tujuh bersaudara pasangan Mohammad Toni dan Alm Muchanah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di MI Muhammadiyah Brebes lulus tahun 1990, lulus dari SMP 2 Brebes Tahun 1993, dan lulus di SMA 2 Brebes Tahun 1996. Pendidikan S1 di tempuh di jurusan Administrasi Negera Universitas Jenderal Soedirman lulus tahun 2001. Pendidikan S2 di Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro lulus tahun 2009 dan menjadi lulusan terbaik dengan predikat cum laude. Awal tahun 2012 berkesempatan memperoleh beasiswa unggulan BPKLN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Program Studi S3 Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro



Penulis pernah bekerja sebagai tacking order sales di PZ Cussons Indonesia cabang tegal tahun 2002 s.d 2006. Pada tahun 2006 s.d sekarang menjadi PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Beristrikan Kristiana Lina Dewi, S.AP (alumni FISIP Undip) PNS di BKD Kabupaten Pemalang, dikaruniani 2 anak Xaviera Noureen PW dan Xabier Enzo PW.

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT dan dengan semangat ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Disertasi ini, dengan judul “Model Kebijakan Pertambangan Berkelanjutan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang”

Disertasi ini merupakan sebagian persyaratan guna mencapai derajat S3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Doktor Ilmu Lingkungan. Atas tersusunnya Disertasi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Orang tua penulis Mohammad Toni atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan.
2. Istriku tercinta Kristiana Lina Dewi wanita yang mendoakan, menemani, memotivasi, melayani segala kebutuhanku dan mendidik anak-anak kita Xaviera Noureen PW dan Xabier Enzo PW dengan ikhlas, sabar, dan penuh cinta
3. Prof Sudharto P Hadi, MES, Ph.D selaku Promotor dan Dr Hartuti Purnaweni, MPA ko Promotor yang memberikan bimbingan ilmu yang sangat berkualitas dan selalu motivasi kepada penulis untuk tetap istiqomah dalam mencari ilmu.
4. Para anggota Pengaji Dr. Drs. Edi Santosa, SU., Dr. Kismartini, MSi, Dr Sudanti, MS., Dr. Henna Rya Sunoko, Apt., MES yang telah memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan disertasi ini
5. Rektor Undip dan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu.
6. Program beasiswa unggulan BPKLN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Bupati Pemalang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala BKD Kabupaten Pemalang yang telah mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu.
8. Segenap Dosen di Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro yang telah memberi bekal dan memperluas wawasan ilmu yang bermanfaat.
9. Segenap karyawan di Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan dan dorongan demi kelancaran studi.
10. Pemerintah Kabupaten Pemalang khususnya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Bantarbolang yang telah memberikan infomasi berkaitan penelitian.
11. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Bappeda, Dinas ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan infomasi berkaitan penelitian.
12. Kepala dan warga Desa Banjarsari, Bantarbolang, Glandang, Karanganyar, Lengerong, Pedagung, Pegiringan, Purana, Sambeng dan Sumurkidang sebagai narasumber dalam penelitian.
13. Saudara-saudara Kandung (Mas Ulis, Mba Yani, Mba Umi, Mas Amin, Mba Titin, dan Eri) yang selalu memberi dorongan dan dukungan
14. Teman-teman di Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan angkatan 5 dan 6 atas semangat dan masukan-masukannya
15. Teman-teman Bidang TK dan SD yang luar biasa.

Penulis mengharapkan karya ini bermanfaat bagi Bangsa Indonesia. Amin

Semarang, 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISTILAH	xviii
ABSTRAK	xxii
RINGKASAN	xxiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C Perumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Keaslian Penelitian.....	16

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengambilan Keputusan.....	32
B. Kebijakan Publik dan Lingkungan Kebijakan Publik.....	38
1. Formulasi Kebijakan Publik.....	44
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	45
3. Lingkungan Kebijakan Publik.....	48
C. Perencanaan.....	50
D. Partisipasi Masyarakat.....	55
E. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	60
F. Kajian Lingkungan	63
G. Kebijakan Pertambangan di Indonesia.....	66
H. Kerusakan lingkungan dan Faktor-faktor penyebabnya.....	72
I. Dampak Lingkungan Fisik dan Sosial adanya aktifitas manusia.....	75
J. Dampak Lingkungan Fisik dan Sosial adanya Pertambangan.....	78

K. Pembangunan Berkelanjutan.....	82
L. Model Kebijakan Pertambangan Berkelanjutan.....	87
1. Model <i>Mining Policy Framework for Mining and Sustainable Development (MPF)</i>	89
2. Manajemen Ekosentris.....	90
3. <i>Collaborative management/co-management</i>	92
4. Paradigma Pengelolaan Kegiatan usaha pertambangan yang baik dan benar.....	93

BAB III. KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kerangka Teori dan konsep.....	95
1. Perencanaan tata ruang wilayah pertambangan.....	96
2. Kajian lingkungan.....	98
3. Implementasi SPPL dan UKL-UPL Pertambangan.....	99
4. Dampak Lingkungan Fisik dan Sosial.....	100
5. Model Kebijakan Pertambangan Berkelanjutan.....	101
B. Kerangka Berfikir.....	103

BAB IV. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	104
1. Ruang Lingkup Spasial.....	104
2. Ruang Lingkup Substansial.....	106
B. Desain Penelitian.....	107
C. Fokus Penelitian.....	108
D. Informan Penelitian.....	108
E. Responden Penelitian.....	110
F. Teknik Pengumpulan Data.....	111
G. Model Analisis Data.....	114
H. Validitas Penelitian.....	116
I. Alur Pikir Penelitian.....	117

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	119
A. Diskripsi Wilayah Penelitian.....	119
1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Pemalang.....	119
a. Geografis.....	119
b. Luas Daerah.....	120
c. Topografi.....	121
d. Keadaan Tanah.....	121
e. Visi dan Misi Kabupaten Pemalang.....	121
f. Wilayah Administrasi.....	122
g. Kependudukan.....	124
h. Dokumen Lingkungan.....	124
i. Permasalahan Lingkungan.....	125
j. Potensi Pertambangan di Kabupaten Pemalang.....	129
2. Deskripsi Wilayah Kecamatan Bantarbolang.....	130
a. Geografis.....	130
b. Luas Daerah.....	130
c. Kependudukan.....	132
B. Hasil Penelitian.....	133
1. Responden.....	133
a. Deskripsi Responden.....	133
b. Karakteristik Responden.....	134
c. Pendidikan Responden.....	135
d. Pekerjaan Responden.....	135
2. Gambaran Umum Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Pemalang.....	136
3. Kebijakan Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang.....	142
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang.....	148
5. Kajian Lingkungan Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang.....	151
6. Implementasi SPPL dan UKL-UPL Kebijakan Pertambangan di	

Kecamatan Bantarbolang.....	155
7. Dampak lingkungan fisik dan sosial adanya kebijakan Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang.....	157
C. Pembahasan.....	159
1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertambangan.....	159
a. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pertambangan.....	161
b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, daya dukung, dan daya tampung lingkungan.....	165
c. Partisipasi Masyarakat.....	168
2. Kajian Lingkungan.....	172
a. Aktor-aktor yang terlibat dan partisipasi masyarakat dalam kajian Lingkungan.....	173
b. Kajian Dampak Lingkungan fisik dan sosial Kegiatan Pertambangan.....	176
3. Implementasi SPPL dan UKL-UPL Kebijakan Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang.....	185
a. Sumber Daya Birokrasi Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup kegiatan pertambangan.....	185
b. Komunikasi antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana.....	188
c. Kegiatan pertambangan di Kecamatan Bantabolang.....	191
4. Dampak Lingkungan Fisik dan Sosial adanya Kebijakan Pertambangan Di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.....	205
a. Dampak Lingkungan Fisik.....	206
1) Perubahan Bentang Alam.....	206
2) Pencemaran tanah, air, udara, dan suara.....	213
3) Kerusakan Sarana dan Prasarana Umum.....	217
b. Dampak Lingkungan Sosial.....	219
1) Perubahan Mata Pencaharian.....	220
2) Kenyamanan Tempat Tinggal.....	222

3) Perubahan Hubungan Sosial.....	228
4) Persepsi dan Sikap.....	231
5) Perbaikan Fasilitas Pendidikan dan Ibadah.....	234
5. Model Kebijakan Pertambangan.....	237
a. Penyusunan rencanaan Tata Ruang Wilayah Pertambangan	238
b. Kajian Lingkungan Pertambangan.....	252
c. Implementasi SPPL dan UKL-UPL pertambangan.....	261

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	271
B. Saran.....	279

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Lokasi Tambang dan Peralatan yang digunakan di Kabupaten Pemalang 9
Tabel 1.2	Dokumen Lingkungan yang digunakan pada Kegiatan Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang 12
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Penelitian peneliti 26
Tabel 2.1	Delapan Tingkatan Partisipasi Masyarakat menurut Arnstein 56
Tabel 2.2	Tipologi Partisipasi 59
Tabel 2.3	<i>Traditional versus Ecocentric Management</i> 91
Tabel 4.1	Jumlah lokasi usaha pertambangan tiap desa dan peralatan yang Digunakan 105
Tabel 4.2	Matrik Fenomena Penelitian yang dikaji 106
Tabel 4.3	Tabel Informan Penelitian 109
Tabel 4.4	Distribusi Responden di Masing-masing Desa 111
Tabel 5.1	Luas Lahan Menurut Jenisnya Dirinci per Kecamatan Tahun 2014 122
Tabel 5.2	Jumlah desa/kelurahan dirinci per kecamatan Tahun 2014 123
Tabel 5.3	Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio dirinci per Kecamatan Tahun 2014 124
Tabel 5.4	Jumlah Rekomendasi UKL dan SPPL Tahun 2013 s.d 2015 125
Tabel 5.5	Potensi Pertambangan di Kabupaten Pemalang 129
Tabel 5.6	Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya per Desa/Kelurahan yang terdapat kegiatan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang Tahun 2014 131
Tabel 5.7	Banyaknya Satuan Wilayah Administrasi per Desa/Kelurahan terdapat kegiatan pertambangan di Kecamatan Pemalang Tahun 2014 131
Tabel 5.8	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantarbolang Tahun 2014 132
Tabel 5.9	Distribusi Responden di setiap desa yang terdapat kegiatan pertambangan pada Kecamatan Bantarbolang 133
Tabel 5.10	Jenis Kelamin, Usia, dan Lama tinggal Responden 134
Tabel 5.11	Matrik Perbedaan Proses Perizinan Usaha Pertambangan di Kabupaten 141
Tabel 5.12	Lokasi Tambang dan Peralatan yang digunakan di Kabupaten Pemalang 142
Tabel 5.13	Daftar Nama Pengusaha, Desa, Luas, dan Jenis Galian Kegiatan Pertambangan dengan Peralatan Manual Kecamatan Bantarbolang 145
Tabel 5.14	Daftar Nama Pengusaha, Desa, Luas, dan Jenis Galian Kegiatan Pertambangan dengan Peralatan Manual Kecamatan Bantarbolang 147
Tabel 5.15	UKL UPL dan Izin Lingkungan kegiatan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang Pasca UU Nomor 23 Tahun 2014 152
Tabel 5.16	Surat Keputusan Bupati Pemalang Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Tahun 2012 s.d 2015 156
Tabel 5.17	Matriks Karakteristik Perbedaan Kegiatan pertambangan di sungai dan di darat Kecamatan Bantarbolang 167

Tabel 5.18	Perbandingan Antara Paradigma Lama dan Baru (<i>Co-Management</i>)	203
Tabel 5.19	Dimensi Pengelolaan Lingkungan di suatu perusahaan.....	212
Tabel 5.20	Substansi, Tahapan, dan Aktor-aktor Model Penyusunan RTRW Pertambangan Berkelanjutan.....	249
Tabel 5.21	Matrik Perbedaan Perencanaan RTRW Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang dengan rekomendasi Model Perencanaan RTRW Pertambangan Berkelanjutan.....	251
Tabel 5.22	Substansi, Tahapan, dan Aktor-aktor Model Penyusunan RTRW Pertambangan Berkelanjutan	259
Tabel 5.23	Matrik Kajian Lingkungan Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang dengan rekomendasi Model Perencanaan Kajian Lingkungan Pertambangan berkelanjutan.....	260

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1	Kontribusi Pajak Pertambangan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
Gambar 2.1	Proses Pengambilan Keputusan.....	34
Gambar 2.2	Tahap-tahap dalam Proses Kebijakan Aktifitas Fungsional.....	40
Gambar 2.3	Model Implementasi Kebijakan (Van Meter dan van Horn)	48
Gambar 2.4	Dampak-dampak Lingkungan pada Pertambangan.....	80
Gambar 2.5	Model Pembangunan.....	86
Gambar 2.6	Paradigma Pengelolaan Pertambangan.....	94
Gambar 3.1	Kerangka Berfikir	103
Gambar 4.1	Peta Lokasi Penelitian Kecamatan Bantarbolang	104
Gambar 4.2	Model Analisis Data	114
Gambar 4.3	Alur Pikir Penelitian	118
Gambar 5.1	Banjir di Kabupaten Pemalang	125
Gambar 5.2	Gerakan Tanah di Kabupaten Pemalang	126
Gambar 5.3	Tanah Longsor di Cikadu, Watukumpul Kabupaten Pemalang	127
Gambar 5.4	Kawah Gunung Slamet setelah erupsi 2014	128
Gambar 5.5	Abrasi di Kawasan Pesisir Daerah Pantai.....	128
Gambar 5.6	Status Pendidikan Responden.....	135
Gambar 5.7	Jenis Pekerjaan Responden.....	136
Gambar 5.8	Tahapan Proses Perizinan Pertambangan Sebelum Diberlakukanya Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	139
Gambar 5.9	Skema Proses Perizinan pertambangan pasca diberlakukanya Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	141
Gambar 5.10	Kontribusi Pajak Pertambangan di Kec Bantarbolang	143
Gambar 5.11	Aktifitas penambangan di Kecamatan Bantarbolang di sungai di darat.....	144
Gambar 5.12	Dampak Kegiatan Usaha pertambangan di Desa Purana Blok Sarwodadi dan di Desa Glandang	158
Gambar 5.13	Perbukitan yang menjadi lokasi kegiatan Pertambangan dan sungai dibawahnya di Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang.....	179
Gambar 5.14	Lokasi kegiatan Pertambangan yang berbatasan langsung dengan Sempandan sungai Comal di Purana Kecamatan Bantarbolang.....	180
Gambar 5.15	Perbukitan dan Mata air yang menjadi lokasi kegiatan Pertambangan di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang.....	181
Gambar 5.16	Lahan persawahan yang menjadi lokasi kegiatan Pertambangan di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang	182
Gambar 5.17	Jalan tambang sebagai sarana transportasi dari lokasi tambang ke jalan umum di Desa Pegiringan dan Desa Banjaranyar di Kecamatan Bantarbolang.....	194
Gambar 5.18	Pembuatan Jenjang tidak dilakukan di Desa Pegiringan dan Desa Sambeng di Kecamatan Bantarbolang	195

Gambar 5.19	Aktifitas Pembongkaran dan Penggalian Menggunakan Peralatan Berat dan Manual di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang	197
Gambar 5.20	Aktifitas Pemindahan Hasil Tambang dari Alat Muat Excavator ke dalam Truck di Desa Sambeng dan Rute Pengangkutan Melewati Pemukiman di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang	198
Gambar 5.21	Jual Beli Hasil Tambang antara Penambang dan Pembeli di Desa Lengerong serta Petugas DO yang Melayani Pembeli di Desa Purana Kecamatan Bantarbolang	199
Gambar 5.22	Reklamasi dengan Menanami Pohon Bezi di Desa Sambeng dan Lahan Bekas Tambang dibiarkan aja di Desa Pegiringan pada Kecamatan Bantarbolang.....	201
Gambar 5.23	Perubahan Bentang Alam Dampak Kegiatan Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang dengan Menggunakan Peralatan Manual di Desa Pegiringan (sebelah kiri) dan Alat Berat di Desa Karanganyar (sebelah kanan)	206
Gambar 5.24	Perubahan Bentang Alam dan Kerusakan Sempadan Sungai Dampak Kegiatan Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang Menggunakan Peralatan Berat di Desa Purana.....	207
Gambar 5.25	Perubahan Bentang Alam dampak Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Peralatan Berat di Desa Sambeng (sebelah kiri) dan Desa Pegiringan (sebelah kanan).....	208
Gambar 5.26	Aktifitas Pengangkutan Hasil Tambang di Kecamatan Bantarbolang Melewati Jalan Desa di Daerah Pemukiman Penduduk	215
Gambar 5.27	Dinding Rumah Penduduk Retak Dampak dari Aktifitas Hilir Mudik Kendaraan Pengangkut Hasil Tambang di Desa Sambeng	216
Gambar 5.28	Kerusakan jalan dan Jembatan di Desa Glandang (kiri) dan Desa Karanganyar (kanan) Akibat dari aktifitas.....	217
Gambar 5.29	Jalan Tambang yang Rusak dan Jalan yang Sudah dibeton di Desa Pegiringan	218
Gambar 5.30	Kerusakan Jalan Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Bantarbolang	219
Gambar 5.31	Warung Makan dan Toko disekitar Wilayah Kegiatan Pertambangan Di Desa Sambeng (Kiri) dan Desa Glandang (kanan).....	222
Gambar 5.32	Asal Tenaga Kerja Kegiatan Pertambangan.....	223
Gambar 5.33	Perubahan Mata Pencaharian.....	224
Gambar 5.34	Tinggal di Lokasi Sekitar Pertambangan Menyenangkan.....	226
Gambar 5.35	Alasan Menyenangkan Tinggal disekitar Pertambangan.....	227
Gambar 5.36	Alasan Tidak Menyenangkan.....	228
Gambar 5.37	Kegiatan yang dilakukan Bersama-sama di Masyarakat.....	230
Gambar 5.38	Perubahan Kegiatan yang Dilakukan Bersama-sama.....	230
Gambar 5.39	Dampak Kegiatan Pertambangan.....	232
Gambar 5.40	Alasan Kegiatan Pertambangan Berdampak Positif.....	232
Gambar 5.41	Kegiatan Pertambangan Berdampak Positif.....	233
Gambar 5.42	Perbaikan fasilitas Pendidikan di Desa Pegiringan dan Masjid Di Desa Sambeng	234

Gambar 5.43	Eksisting Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang	238
Gambar 5.44	Model Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pertambangan yang Berkelanjutan.....	242
Gambar 5.45	Kajian Lingkungan Pertambangan	252
Gambar 5.46	Model Rekomendasi Tahapan Kajian Lingkungan Pertambangan Berkelanjutan.....	255
Gambar 5.47	Eksisting Implementasi SPPL dan UKL-UPL Pertambangan Berkelanjutan.....	261
Gambar 5.48	Model Rekomendasi Implementasi SPPL dan UKL-UPL Pertambangan Berkelanjutan.....	263
Gambar 5.49	Pengawasan Teknis Pertambangan.....	267
Gambar 5.50	Model Model Perjanjian sewa menyewa /jual beli lahan dengan pemilik lahan	269

DAFTAR ISTILAH

Aktor Kebijakan	: Individu atau kelompok yang mempunyai andil didalam bidang kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah
AMDAL	(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
BKPRD	: Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dampak	: Perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktifitas manusia termasuk didalamnya dampak pembangunan fisik dan non fisik.
Dampak sosial	: Konsekuensi yang timbul adanya suatu pembangunan maupun penerapan suatu kebijaksanaan dan program dan mengakibatkan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas manusia
Dampak lingkungan fisik	: berubahnya morfologi alam, ekologi, hidrologi, pencemaran air, udara, dan tanah. Perubahan morfologi atau bentang alam
Daya Dukung lingkungan hidup	: Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
Daya Tampung lingkungan hidup	: Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya
DPU	: Dinas Pekerjaan Umum
Eksplorasi	: Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi

mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Good Mining Practice

Suatu proses kegiatan usaha pertambangan mulai dari penetapan wilayah, sampai dengan proses pengolahan dan pemurnian, dilaksanakan dengan cara sistematis, memenuhi kriteria teknis, menghormati norma-norma, hak-hak dasar masyarakat setempat, dan keseimbangan lingkungan hidup, sesuai peraturan perundang-undangan, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan kemandirian bangsa

Kebijakan Publik

: Serangkaian tindakan yang ditetapkan aktor atau sejumlah aktor yang mempunyai tujuan tertentu dan bukan merupakan keputusan berdiri sendiri. Kemudian kebijakan publik merupakan apa yang sebenarnya dilakukan dalam rangka memecahkan masalah, dan bukan sekedar ide atau gagasan atau keinginan pemerintah. Hal ini dikarenakan kebijakan publik bukan sekedar bagaimana proses kebijakan dibuat tetapi berkaitan dengan implementasi dan evaluasi kebijakan

Kegiatan pascatambang

: Kegiatan terencana dan sistematis dan berlanjut setelah akhir atau sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.

KLHS

: (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Instrumen yang berfungsi dan bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan telah terintegrasi dalam pembangunan wilayah, sehingga dalam penyusunan rencana tata ruang dan wilayah Pemerintah Daerah wajib melakukan KLHS

Lingkungan

: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Lingkungan Biotik

: Segala makhluk hidup yang ada disekitar individu baik tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia

Lingkungan Fisik

Segala benda mati dan keadaan fisik yang ada disekitar individu

Lingkungan Kebijakan

: Konteks khusus dimana kejadian-kejadian disekeliling khusus kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. lingkungan kebijakan

Paradigma

: berfokus pada manajemen organisasi yang berdampak pada alam.

ecocentric	Hasilnya menyelaraskan organisasi dengan lingkungan alam. Penyelarasan ini melibatkan pandangan yang berbeda dari tujuan organisasi, nilai-nilai produk, dan sistem produksi serta organisasi, lingkungan dan fungsi bisnis.
Pembangunan berkelanjutan	: Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri
Pembangunan yang berwawasan lingkungan	: Pembangunan seyogyanya tidak hanya menekankan pada pembangunan fisik saja, tetapi harus lebih menekankan pada pembangunan manusia dengan modal sosial yang dimilikinya. Modal sosial adalah satu komponen penting dalam menggerakkan kebesamaan, mobilitas ide, ke saling percayaan dan ke saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.
Penambangan	: Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
Pengendalian dampak lingkungan	: Upaya untuk mencegah, meminimalkan dampak negatif suatu usaha (proyek pembangunan) terhadap lingkungan sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga dengan baik
Perencanaan	: strategi untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktifitas tentang keputusan dan implementasi.
<i>Perceived impact atau special impact</i>	Dampak yang timbul dari persepsi masyarakat terhadap resiko dari adanya proyek. Persepsi, sikap dan kepercayaan masyarakat membentuk interpretasi tentang proyek dan dampaknya beberapa contohnya adalah stress, rasa takut
<i>Real atau standart impact</i>	: Dampak yang timbul akibat dari aktifitas proyek : pra kontruksi, kontruksi dan operasi misalnya pemindahan penduduk, bising atau polusi udara.
RT RW	: Rencana Tata Ruang dan Wilayah
SPPL	(Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL
Studi kelayakan	: Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan

kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

- | | |
|--------------------|--|
| Tata ruang | : Wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Tata ruang perlu direncanakan dengan maksud agar lebih mudah menampung kelanjutan perkembangan kawasan yang bersangkutan |
| UKL-UPL | (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. |
| UNCED | : <i>United Nations Conference on Environment and Development</i> |
| Usaha pertambangan | : Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang |
| WCED | : <i>World Commission on Environment and development</i> (Komisi Dunia tentang lingkungan dan Pembangunan) |